

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM FUNGSI
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KPUD PADA TAHAP PENETAPAN
CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**



**Disusun Oleh :
MUKMINA INNYA HORO**

NPM : 04 05 08908
Program : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM FUNGSI
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KPUD PADA TAHAP PENETAPAN
CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**

Diajukan Oleh :

MUKMINA INNYA HORO

NPM : 04 05 08908
Program : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 Juli 2010**

Dosen Pembimbing



Sumyar, SH. M.Hum

Mengetahui

Dekan,



Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Agustus 2010
Tempat : Lantai II Ruang Dosen Bpk. Y. Hartono, SH. M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Sumyar, SH. M.Hum
Sekretaris : Y. Hartono, SH. M.Hum
Anggota : Hyronimus Rhiti, SH. L.L.M

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....

FAKULTAS
HUKUM

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum



Penulisan Hukum/Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk

- ❖ Tuhan Yesus Kristus, Sahabatku dan Kekasih Jiwaku
- ❖ Papa dan mama (Bpk. Imanuel Horo, SH dan Ibu Martha Pitang)
- ❖ Kakek dan Nenek, Hermanus Rangga Horo, Martha Mete, Daniel Pitang dan Katherina Kapu Theedens
- ❖ Lamonegu Shadewa
- ❖ Sahabatku tersayang Yosefa Ratih Adoe, SE
- ❖ Om Bambang Prasetyo, SH dan Tante Ir. Qadriathi Dg. Bau. M.si.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KPUD PADA TAHAP PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG.**

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka pelaksanaan tugas akhir dalam program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan baik dalam proses penyusunan, dalam pembahasan maupun dalam mengambil kesimpulan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini pula ijinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah menunjang dan mendukung tersusunya penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bapak Ir. A. Koesmargono, M. Const. Mgt., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak Sumyar, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis.
4. Bapak Imanuel Horo SH, selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah memberikan ijin penelitian.
5. Bapak Gerson Tanggu Dendo, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah menyediakan waktu untuk pelaksanaan wawancara.
6. Bapak Drs. Yohanes Billi Kii selaku Ketua KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Ibu Yakoba Kaha, S.sos selaku anggota KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah memberikan masukan berupa saran, data, informasi serta petunjuk-petunjuk seputar permasalahan yang diteliti penulis.
7. Bapak Jeffry A. Galla, SH dan Ibu Retno A. Batara Goa selaku Anggota KPUD Kabupaten Sumba Barat yang telah memberikan informasi baik dalam bentuk data dan wawancara.
8. Bapak Christofel Horo, SH selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah memberikan waktu untuk pelaksanaan wawancara.
9. Bapak Moses Gheda Bokol, SH selaku mantan Ketua Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah memberikan data dan menyediakan waktu untuk pelaksanaan wawancara.

10. Orangtua penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran dan pengorbanan memberikan doa, nasihat dan biaya sehingga dapat mendukung penulis selama masa studi hingga akhir disusunnya penulisan hukum ini.

11. Kedua adik penulis yang memberikan dukungan moril dan doa sehingga tersusunya penulisan hukum ini.

12. Teman-teman FH UAJY (Ary, rensi, lola, oliv, lintang, ivanna, mezak, rimba, lia, Austin, Eli) dari lubuk hatiku yang paling dalam, terimakasih untuk cinta dan ketulusan yang kalian berikan padaku.

Bagi semua pihak maupun teman-teman yang memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak dapat disebutkan satu persatu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus, kiranya kebersamaan kita dapat berlanjut di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus serta kita diberkatinya.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pemerintahan pada khususnya

Sekian dan terimakasih

Yogyakarta 30 juli 2010

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2010

Yang menyatakan,

Mukmina Innya Horo

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Pernyataan Keaslian	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran	xi
Abstract	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat	9
E. Keaslian Penulisan	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Hipotesis.....	12
H. Metodologi	14
I. Sistematika	18

BAB II PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Periode 2008-2013	20
1. Pembentukan dan Susunan DPRD	
Kabupaten Sumba Barat Daya	28
2. Fraksi-fraksi yang ada di DPRD	
Kabupaten Sumba Barat Daya	31
3. Alat kelengkapan DPRD	
Kabupaten Sumba Barat Daya	33
4. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD	
Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum	46

B. Tinjauan Terhadap Lembaga Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kabupaten Sumba Barat	54
1. Tugas dan wewenang KPUD	54
2. Kewajiban KPUD.....	55
3. Kedudukan KPUD	56
4. Pertanggungjawaban KPUD	57
5. Hubungan KPUD dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam proses Pilkada.....	57

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada Langsung di

Kabupaten Sumba Barat Daya	64
1. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya	64

2. Kelemahan dan kelebihan Pilkada Langsung	85
3. Asas-asas Pilkada Langsung	87
4. Interelasi Penyelenggaraan Pilkada Langsung	88
D. Gambaran Umum Panitia Pengawas PILKADA Langsung di Kabupaten Sumba Barat Daya	90
E. Peran DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja KPUD pada Tahap Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	97
1. Peran DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menurut PP No. 6 Tahun 2005	97
2. Peran DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya secara Praktek di Lapangan	99
F. Hasil Wawancara dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya	112
G. Kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjalankan fungsi Pengawasan terhadap kinerja KPUD pada tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	116
H. Upaya yang ditempuh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Mengatasi kendala pengawasan terhadap kinerja KPUD pada tahap Penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	120

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan 122

B. Saran..... 124

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 14/DPRD/SBD/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2008-2013 Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-939 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Sumba Barat Daya dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-940 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Berita acara Nomor 240/KPU/SB/VIII-2008 Tentang Hasil verifikasi Tahap Akhir Pemenuhan Syarat Administrasi Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2008
6. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan SuaraPILKADA Kabupaten Sumba Barat Daya.

ABSTRACT

Since democracy became the main attributes of a modern State, the institution of representation is the main mechanism for realizing the normative idea that the government must be run with the will of the people. Paragraph 2 Verse (1) of the 1945 Constitution states that sovereignty was in people hand and executed according to the Constitution. Parliament is a democratic instrument for realizing people's sovereignty in the area. Thus the presence of democracy is a prerequisite for the proper functioning of democracy. Law. 32 Year 2004 on Regional Government is the juridical foundation of the implementation of direct regional elections. Paragraph 56 Verse (1) states that the regional head and deputy head of the selected region in one pair of candidates conducted democratically under the principles of direct, universal, free and confidential, honest and fair. Parliament has three functions namely legislative, budgetary and oversight. Of these three functions, the most important supervision is function at the Regional Head Election is directly because parliament is the ultimate political authority from the people who carry mandate to supervise the implementation of the Regional Head Election. Legal problem is how the role of West Sumba district legislature in the implementation of oversight functions on the performance of local electoral commission at this stage the prospective head of the Stipulation of Local / Regional Vice-Head, any obstacle facing parliament and what efforts are taken by Parliament for West Sumba overcome the obstacles. The aim study is to investigate the role of West Sumba district legislature, constraints and legislative efforts made to overcome these obstacles. This study is an empirical law, with primary data as the primary data and secondary data such as legal materials used as support.

Method of data collecting by interview, literature and observation. This legal research took place in Parliament, the Regional Electoral Commission and the Supervisory Committee of Southwest Sumba. Resource is the vice chairman of parliament, local election commission secretary, a former chairman of the election supervisory committee and community leaders. The method used is descriptive and qualitative. Southwest Sumba Regency Parliament performs its oversight function but not optimal because it does not conduct public hearings to solicit the community's aspirations, not the establishment of monitoring teams to conduct investigations in the field, but the parliament held a hearing with the Regional Electoral Commission on voter lists and campaign violations should Article 59 of Law No. 32 of 2004 provides a wide space for the public to be involved in the process of determining the prospective regional head / vice head of region, regional election commission, which is located very strong (super body) needs to be supervised because the vulnerable cause deviations, Parliament must be given the authority to carry out testing of the candidate's head local / regional head and deputy supervisory committee should be fixed, act widely and independently.

Keywords: democracy / parliament / Function Supervision / Decision candidates / local election commission / committee elections supervisor.